

Usut Dana Bansos Masih Menunggu Hasil Audit BPK

PONTIANAK - Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat senilai Rp22,14 miliar hingga kini belum tuntas, meski pengusutannya sudah berjalan sejak 2009. Bahkan pernah ditangani KPK, sebelum kembali diambil alih Polda Kalbar.

Kepolisian menyatakan masih menunggu hasil audit BPK untuk penuntasannya. "Kita masih menunggu hasil audit BPK," kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Selasa (15/5) di Pontianak.

Menurut Mukson, persyaratan yang diminta BPK sudah dilengkapi dan diserahkan untuk mendapatkan hasil audit. Salah satunya dengan melengkapi keterangan saksi, yakni memeriksa ketua umum Pengda

• ke halaman 15 kolom 5

Usut Dana Bansos Masih Menunggu Hasil Audit BPK

Sambungan dari halaman 9

PSSI dan mantan ketua umum KONI Kalbar waktu lalu. Zulfadli dan Usman Jafar, beberapa waktu lalu, keduanya kini menjabat sebagai anggota DPR dapil Kalbar.

Sementara dalam kasus bansos KONI, Polda telah menetapkan seorang tersangka, yaitu mantan wakil bendahara KONI, Iswanto.

Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Burhanudin Abdullah menyarankan Polda Kalbar menyerahkan kembali penanganan kasus Bansos ke KPK kalau memang tidak mampu. Biar kasusnya tuntas dan tidak membuat kecewa masyarakat. "Kasus bansos adalah kasus besar. Polda kita nilai terlalu lamban dan sudah lama tidak menunjukkan kemajuan pengusutannya," kata Burhan.

Mencuatnya kasus bansos

ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias *disclaimer opinion*. Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK

Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah. Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar. (*stm*)